

Politik Ke-Minahasaan dari Waktu Ke Waktu: Perspektif Strukturasi.

Alfon Kimbal

Abstract : the presence of the new local elites to be threat for structure has been established through new social practices they trying to do. Through that social practices, new local elites trying to derutinisasi old habits to be new structure allow dominance and their legitimacy. This article purpose to reaffirmed social change facts always inherent on the building ethnic and politic in Minahasa. Especially be related with the power context inside it.

Western civilization in terms of education and religion to give modalities for the christian actor to derutinisasi old structure their according to mistakenly. Because conducted a massive and continuous, action of derutinisasi reap success in shaping the structure of christianity on the groud of Minahasa.

After the opening tap democratic new order evidently to result the another interesting phenomenon. The trend of revival ethnic identity sticking to the surface, also happened in Minahasa. The traditional structures trying to repeat past power.

Keywords : Politic, Perspective Structure, Minahasa

PENDAHULUAN

Tulisan ini bertujuan untuk menegaskan kembali fakta-fakta perubahan sosial yang senantiasa inheren dalam bangunan etnik dan politik di Minahasa, terutama berkaitan dengan konteks kekuasaan didalamnya. Fakta-fakta tersebut akan diurai satu per satu melalui pelacakan kembali kondisi dan situasi masa lalu Minahasa, hingga hubungan dan relasinya dengan dunia luar yang akhirnya turut mengkonstruksikan bangunan strukturnya di masing-masing masa. Pembahasan dalam studi ini akan dibedah menggunakan konsep Strukturasi dari Anthony Giddens. Struktur keminahasaan yang selalu berubah mengindikasikan adanya interaksi dengan elit lokal (*agency*) secara timbal balik dan senantiasa dikonstruksikan secara terus-menerus. Kehadiran elit-elit lokal baru menjadi ancaman bagi struktur yang telah mapan lewat praktek sosial baru yang berusaha mereka lakukan. Lewat praktek-praktek sosial tersebut, elit-elit lokal baru mencoba men-de-rutinisasi kebiasaan lama menjadi struktur baru yang memungkinkan dominasi serta legitimasi mereka. Di satu sisi, struktur yang dibangun memberi pengekanan

(*constraining*) terhadap tindakan elit-elit lokal masa lalu.

Minahasa is a most fruitful region for anyone who studies the conditions of changing traditions. Cuplikan pernyataan diatas mungkin tepat untuk menggambarkan Minahasa sebagai daerah yang selalu mengalami perubahan tradisi. Hal yang wajar-wajar saja ketika kita mengingat bahwa sejak abad ke-16, Minahasa telah didatangi bermacam kebudayaan serta pengaruh dari luar, terutama bangsa-bangsa barat. Perjumpaan dengan dunia luar yang membawa kebudayaan yang berbeda menghasilkan akulturasi yang entah atas kemauan sendiri atau dipengaruhi oleh faktor pemaksaan. Pola inilah yang mewarnai kondisi sosial masyarakat Minahasa hingga saat ini, begitupun dengan elitnya. Lewat tulisan ini, diharapkan memberi sumbangsih pemikiran tentang pembahasan keminahasaan secara khusus, selain itu turut menambah khasanah pengetahuan mengenai studi elit lokal di Indonesia.

Sistematika tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian. Diawali dengan uraian mengenai Minahasa sebagai suatu bangunan etnik yang senantiasa mengalami perubahan. Kemudian

pembahasan mengenai teori Strukturasi yang menjadi kerangka berpikir tulisan ini. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *tonaas dan walian* sebagai elit lokal tradisional Minahasa; dan diakhiri dengan uraian tentang dinamika elit lokal Minahasa kontemporer, termasuk persinggungannya dengan elit-elit lokal lama.

Minahasa dan Perubahan

Tanah Minahasa adalah semenanjung yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi. Pegunungan dan lembah silih berganti menghiasi wilayah ini. Di atas pegunungan-pegunungan tersebut, menjulang gunung-gunung tinggi yang beberapa diantaranya sesekali menunjukkan aktivitas gunung berapi. Sejak sekian abad yang lalu, tanah ini pun telah didiami oleh penduduk yang heterogen. Mereka terdiri dari beberapa subetnik masyarakat yang berbeda, namun perlahan melebur menjadi satu kesatuan etnik yang dikenal sebagai orang Minahasa. Bahkan dari istilah “Minahasa” itu sendiri

Berdasarkan bahasa dan dialeknya, orang Minahasa dapat dibagi dalam delapan subetnik, yakni Tonsea, Tombulu, Toulour, Tontemboan, Tonsawang, Bentenan (atau Ratahan), Ponosakan, dan Bantik. Kelompok-kelompok subetnik tersebut, tersebar di daerah-daerah pegunungan, pesisir pantai serta pulau-pulau kecil di sekitar Minahasa.

Di masa lalu, lewat sistem komunal yang berkembang di masing-masing subetnik tersebut, orang Minahasa membentuk unit-unit politik yang disebut *walak*. Struktur pemerintahan *walak* ini dijalankan bersendikan asas-asas mapalus. Lundström-Burghoorn menjelaskan bahwa yang disebut *walak* sebenarnya ialah suatu kelompok desa dengan penduduknya. Sedangkan penduduk dalam sebuah *walak* itu bertautan darah

satu dengan yang lainnya dan mempunyai garis keturunan yang sama. Pemimpin dari sebuah *walak* disebut *kepala walak*. Mereka juga biasanya adalah pemimpin dalam struktur religi masyarakat Minahasa kuno yakni sebagai *tonaas* dan *walian*. Dengan demikian, struktur adat ikut didominasi secara bersamaan dengan struktur pemerintahan oleh mereka.

Dalam perkembangannya, jumlah penduduk dalam sebuah *walak* semakin meningkat dan memperbesar potensi konflik diantara mereka. Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara mereka, maka salah satu pihak akan keluar menyebar dari wilayah *walak* itu untuk mencari tempat kediaman baru. Di tempat yang baru itu kemudian mereka mendirikan struktur *walak* yang baru. Serangkaian proses perpindahan dan penyebaran diatas dikenal dengan istilah *tumani* atau *matani*. Walaupun telah terpisah dari tempat asalnya, *walak-walak* baru itu tetap memiliki hubungan dengan *walak* induk. Oleh karena itu, ciri teritorial antar *walak* tetap berdasarkan atas kedekatan darah atau persaudaraan. Akhirnya, terciptalah sebuah jaringan atau persekutuan antar *walak* yang disebut *pakasaan*.

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa, serangkaian proses perubahan sosial terjadi perlahan dalam struktur masyarakat Minahasa. Terutama bangsa Belanda yang sukses “bersahabat” berkat kontrak-kontrak perjanjian yang mereka tawarkan. Dengan kontrak-kontrak itu pula yang perlahan menjadi dasar dominasi kompeni atas tanah Minahasa dan elit-elit tradisionalnya; nyaris tanpa perlawanan. Proses perubahan sosial semakin kentara saat Kristenisasi oleh para utusan lembaga *zending* dan para misionaris mengalami kesuksesan besar sekitar abad ke-16. Agama Kristen akhirnya perlahan menjadi struktur dan fondasi masyarakat di era selanjutnya, yang turut pula mengekang dominasi struktur tradisional Minahasa beserta elit-

elitnya. Gereja menjadi struktur dan elit-elit gereja menguat menjadi aktor dominan dalam konteks Minahasa kontemporer.

Strukturasi

Menurut gagasan strukturasi, proses perubahan sosial merupakan hasil interaksi antara agen dan struktur. Bagi Giddens, agen dan struktur bukanlah dua gugus fenomena tertentu yang saling terpisah atau bersifat dualisme, namun menggambarkan suatu dualitas. Dalam pola dualitas tersebut, struktur dipahami sebagai seperangkat aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang selalu diproduksi dan direproduksi. Struktur dapat memberi pembatasan atau kekangan (*constraining*) namun di satu sisi dapat juga memberdayakan (*enabling*) agensi. Adapun agensi dalam hal ini dipahami sebagai aktor yang tidak hanya dapat dikekang oleh struktur, namun dapat bertindak secara logis melibatkan kekuasaan demi mentransformasi struktur. Logika inilah yang disebut Giddens sebagai dialektika kontrol (*dialectic of control*).

Sebagai seperangkat *rules and resources*, struktur dalam pandangan Giddens berbeda dengan pengertian struktur yang konvensional. Kritik Giddens bahwa pandangan konvensional tentang struktur cenderung lebih tertuju pada “fungsi” daripada “struktur” dan meletakkan struktur sebagai sesuatu yang berada di luar tindakan agen. Padahal menurutnya struktur hanya dapat terbentuk di dalam dan melalui tindakan agensi yang melakukan de-rutinisasi. Begitupun tindakan agensi, dapat ditentukan oleh struktur yang melakukan rutinisasi. Tindakan itu disebut dengan praktik sosial. Pola relasi yang diuraikan diatas menunjukkan segi dualitas dari struktur dan agensi. Selanjutnya Giddens membagi struktur dalam tiga gugus meliputi signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Struktur signifikasi menyangkut skemata simbolik,

pemaknaan, penyebutan, dan wacana. Struktur dominasi mencakup skemata penguasaan atas orang (*politics*) dan barang (*economy*). Sedangkan struktur legitimasi menyangkut skemata peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum. Ketiga gugus struktur itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan membentuk praktek sosial. Pada gugus signifikasi terdapat praktek sosial komunikasi. Pada gugus dominasi terdapat praktek sosial kekuasaan. Pada gugus legitimasi ada praktek sosial sanksi.

Sementara itu, agensi dalam konsep strukturasi mengacu pada aktor yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Dan oleh karenanya, agensi menyiratkan pula kekuasaan yang melekat padanya. Tindakan agensi berkaitan dengan beberapa hal yakni motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Motivasi tak sadar menyangkut tindakan yang didasarkan pada motif yang sebenarnya tidak berhubungan dengan tindakan tersebut. Kesadaran diskursif menyangkut tindakan yang rasionalisasinya (alasan melakukannya) mampu diekspresikan secara verbal atau eksplisit oleh agensi. Sedangkan kesadaran praktis merujuk pada tindakan yang dihasilkan seseorang akibat rutinitas atau kebiasaan secara umum. Kesadaran praktis dijalani oleh agensi demi mendapatkan rasa aman dalam dirinya (*ontological security*) karena tidak melakukan tindakan yang berbeda dari biasanya. Lewat kesadaran praktis ini, struktur dapat mengekang atau membatasi tindakan agensi lewat tindakan yang terutinisasi. Sebaliknya, dengan kesadaran diskursif yang muncul akibat proses instropeksi dan mawas diri (*reflexive monitoring of conduct*), agensi dapat mentransformasi struktur melalui de-rutinisasi tindakan. De-rutinisasi

menghasilkan praktek sosial baru yang perlahan menjadi struktur baru. Struktur baru akan mulai terbentuk jika praktek sosial baru tersebut mampu bertahan dalam jangka waktu tertentu (*timeless*) dan dilakukan di banyak tempat (*spaceless*).

Tonaas dan Walian: Jejak Elit Tradisional Minahasa

Demokrasi dengan nilai-nilai lokal sebenarnya telah ada dalam masyarakat Minahasa kuno. Untuk memilih pemimpinnya, anggota masyarakat sebuah walak tidak mendasarkannya pada garis keturunan (seperti tradisi pemerintahan kerajaan di wilayah-wilayah tetangga Minahasa kala itu), melainkan dalam sebuah pemilihan (*election*). Berkaitan dengan itu, mari simak penuturan L. Adam berikut ini:

“Jika suku takut akan serangan-serangan musuh yang selalu mengancam, maka orang yang paling ksatria dan berani dari penduduklah, pada waktu yang aman yang paling arif dan bijaksana, yang paling tua, rupanya yang mengendalikan pemerintahan. Dalam peperangan kepala-kepala itu merupakan pemuka-pemuka perang (*teterusan*), pada masa damai tak lebih daripada pemimpin-pemimpin pada pelaksanaan adat yang diwariskan dan diterapkan dengan seksama, oleh nenek moyang.”

Seseorang dapat dipilih menjadi kepala walak apabila dia mempunyai *keter*. Istilah *keter* ini, dalam bahasa Tontemboan (salah satu subetnik Minahasa), mengacu pada kekuatan fisik dan juga spiritual yang dinyatakan berupa keberanian, kegigihan, kecakapan, kekayaan, kejantanan, dan kesuburan. Keberanian seseorang kerap ditunjukkan lewat aktivitas-aktivitas *headhunting* (pengayauan, perburuan kepala manusia) atau kegiatan beresiko lainnya. Sedangkan kekuatan spiritualnya

termanifestasi dalam keahlian pengobatan, menafsirkan suara burung (*manguni*), dan beberapa jenis binatang lainnya. Dalam perannya sebagai pemimpin, dia tidak boleh sewenang-wenang karena akan mendapatkan semacam sanksi dari *Opo'* (dewa) sehingga menjadi *weles* atau tanpa kekuatan.

Tugas seorang kepala walak tidak terbatas pada aspek pemerintahan saja, namun juga menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ritual-ritual adat. Makanya, kepala-kepala walak biasanya dipegang oleh para elit adat seperti *tonaas* dan *walian*. Dengan kekuasaan di dua ranah, dominasi mereka menjadi semakin mutlak. Dominasi *tonaas* dan *walian* terus berlangsung dengan didukung oleh struktur-struktur mapan itu. Tindakan-tindakan anggota walak seperti kapan saat yang tepat untuk berburu, berkebun, berperang, sampai dengan membangun rumah, ditentukan berdasarkan “*restu*” *tonaas* dan *walian*. Sementara untuk mendapatkan “*restu*” mereka, para anggota walak harus melakukan tindakan tertentu berdasarkan beberapa petunjuk, termasuk yang bersifat material. Kesimpulannya, elit-elit tradisional mendapatkan “*pemberdayaan*” dari struktur adat yang bermain dalam tiga gugus sekaligus. Gugus signifikasi menghasilkan praktek sosial komunikasi yang membangun wacana bahwa *tonaas* dan *walian* adalah pelindung serta rujukan sosial masyarakat. Gugus dominasi ditunjukkan lewat praktek sosial dominasi elit-elit tersebut terhadap penguasaan orang (politik) maupun penguasaan barang (ekonomi) di dalam sebuah walak. Gugus legitimasi terlihat dari berlakunya norma-norma adat yang mengikat anggotanya dengan ancaman sanksi bagi yang membangkang. Praktek-praktek sosial dalam struktur adat ini dirutinisasi secara terus menerus dan melanggengkan kekuasaan *tonaas* dan *walian*.

Hadirnya kolonisasi bangsa-bangsa barat mengancam kemapanan struktur adat tersebut. Bermula dari ketidakmampuan elit-elit tradisional dalam memberi perlindungan warganya secara mandiri atas gangguan-gangguan kerajaan Bolaang-Mongondow dan Spanyol. Maka pada tahun 1644, dikirim utusan ke Ternate untuk meminta agar Belanda mau “bersekutu” dan “bersahabat” melawan dua kekuatan besar itu. Belanda merespon permintaan itu dengan mengirim armada gabungan Belanda-Ternate untuk berperang melawan Spanyol. Perlahan, Spanyol dapat “diusir” dari tanah Minahasa. Dan pada tahun 1654, dibangun sebuah benteng Belanda di Manado dengan nama, *de Nederland Vastigheid*. Dalam serangkaian proses yang panjang, akhirnya Belanda-Minahasa berjumpa pada sebuah kontrak yang merupakan titik awal bercokolnya kompeni di tanah Minahasa. Kontrak itu merupakan perjanjian “persahabatan” dan “persekutuan”, yang dikenal dengan istilah *Verbond 10 Januari 1679*. Kontrak ini kemudian membuka jalan bagi kontrak-kontrak selanjutnya yang terus diperbaharui oleh pihak Belanda. Inti kontrak-kontrak itu adalah bahwa Belanda memberikan perlindungan bagi warga Minahasa akan tetapi merekapun menuntut kesetiaan Minahasa atas kontrol Belanda.

Dengan adanya kontrak-kontrak itu, fungsi elit-elit tradisional perlahan semakin digeser dari posisinya sebagai pemimpin walak kemudian menjadi kaki tangan kompeni. Campur tangan Belanda dalam kehidupan masyarakat Minahasa semakin kentara, bahkan dalam struktur pemerintahannya lambat laun mengalami semacam birokratisasi-sentralistis dari Belanda. Struktur pemerintahan yang dahulu disebut *walak*, digeser berdasarkan kontrol Belanda menjadi distrik-distrik yang dikepalai oleh seorang *mayoor*. Elit-elit tradisional saat itu tidak lebih hanya merupakan kaki

tangan Belanda dan hanya berupa aktor *intermediary* antara masyarakat dan kompeni. Pola ini akhirnya terstrukturisasi karena pola de-rutinisasinya terjadi di seluruh wilayah Minahasa dan dilakukan secara berulang-ulang.

Disaat yang bersamaan, kesuksesan serupa dialami oleh para penginjil dan misionaris Kristen dari Eropa. Kristenisasi yang mereka lakukan mencapai puncaknya selewat perempatan ketiga abad ke-19. Berhasilnya kekristenan untuk menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Minahasa saat itu mungkin dipengaruhi oleh sumbangsih pendidikan yang turut mereka bawa. Awalnya hanya bangunan gereja yang dirangkap sekolah dan menerima banyak siswa pribumi. Kemudian berkembang dengan dibangunnya banyak bangunan sekolah dengan beberapa guru pribumi hasil didikan gereja. Berdasarkan data dalam laporan Sekretaris Jenderal Hindia Belanda, W.O. Gallois, menunjukkan betapa pesatnya perkembangan pendidikan di Minahasa ketimbang di daerah-daerah lain di jaman itu. Bayangkan saja, ketika Banten dan Batavia masing-masing hanya mempunyai sekolah pribumi sejumlah 9 dan 35 sekolah, di Minahasa sudah ada 216 sekolah pribumi! Kesimpulannya, pendidikan adalah pintu masuk keberhasilan kristenisasi di Minahasa. Mulai saat itu, agama Kristen semakin menguat menjadi struktur baru bagi masyarakat Minahasa lewat peran gereja, bahkan sampai saat ini.

Lalu bagaimana respon adat terhadap kristenisasi tersebut? Sebenarnya sejak dahulu telah ada jurang pemisah yang lebar antara adat dan kekristenan. Perbedaan itu memicu gesekan antara keduanya bahkan sejak awal pertemuan antar kedua belah pihak. Hal itu digambarkan oleh Thufail sebagai berikut:

“Kedatangan misionaris Jerman dan misionaris Belanda pada abad ke-19 disambut dengan perlawanan keras dari pada *tonaas* (pemuka adat), yang beranggapan bahwa misionaris Protestan itu akan melarang kepercayaan dan ritual tradisional mereka. Pada kenyataannya, memang itu yang dilakukan oleh para misionaris tersebut. Mereka berusaha menghentikan seluruh praktek dan ritual yang dipandang bertentangan dengan ajaran Kristen, antara lain praktek ramalan dengan menggunakan suara burung, konsumsi minuman keras tradisional (*saguer*) yang berlebihan, penggunaan jimat, dan pemujaan nenek moyang(...) Sebagai hasilnya, pada pertengahan abad ke-20, hampir seluruh kepercayaan dan ritual tradisional menghilang dari Minahasa.”

Uraian diatas menunjukkan usaha pengekangan yang coba dilakukan oleh struktur lama (adat) tapi mendapat perlawanan dari para aktor Kristen barat dalam kesadaran diskursifnya. Artinya, peradaban barat dalam hal pendidikan dan keagamaan memberi modalitas bagi aktor kristen tersebut untuk mende-rutinisasi struktur lama yang menurut mereka keliru. Karena dilakukan secara masif dan kontinyu, tindakan de-rutinisasi tersebut menuai keberhasilan dalam membentuk struktur kekristenan di tanah Minahasa. Kedudukan elit-elit tradisional Minahasa seperti *tonaas* dan *walian* digusur dalam struktur masyarakat Minahasa, digantikan oleh elit-elit baru yang Kristen.

GMIM dan Elit-elitnya: Strukturasi Kekuasaan di Era Kontemporer Minahasa

Konstruksi struktur sosial di Minahasa dalam konteks kekinian tidak dapat terlepas dari jejak masa lalunya. Modernisasi yang dibawa masuk kolonialisme terutama dalam hal agama sangat berpengaruh dalam pembentukan struktur masyarakat Minahasa saat ini. Faktanya, dominasi demografis pemeluk agama Kristen di tanah Minahasa adalah hal yang mencolok. Menurut data Sensus Penduduk tahun 2010, agama Kristen Protestan dipeluk oleh 1.444.141 jiwa (63,6 %) penduduk Sulawesi Utara. Bandingkan dengan jumlah pemeluk agama lainnya seperti Islam 701.699 jiwa (30,9 %) , Katolik 99.980 jiwa (4,4%), Hindu 13.133 jiwa (0,58%), Budha 3.076 jiwa (0,13%), Khong Hu Chu 511 jiwa (0,02%), lainnya 1.363 jiwa (0,06%). Kondisi yang berbanding terbalik dengan komposisi keagamaan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang didominasi agama Islam.

Kekristenan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Minahasa, termasuk dalam aspek politik pemerintahan. Untuk memainkan peran itu, agama Kristen terlembagakan dalam instusi-institusi formal berbentuk gereja. Data Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011 menyebutkan bahwa ada 63 denominasi (satuan organisasi) gereka yang tersebar dalam 2.859 unit gereja di seluruh tanah Minahasa.

Apabila dibandingkan berdasarkan kuantitas anggota serta luas wilayah pelayanan, yang terbesar dari antara gereja-gereja itu adalah Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM). Dominasi GMIM sebenarnya merupakan turunan dari pendahulunya yang adalah peletak kekristenan pertama di Minahasa seperti *NZG* dan *Indische Kerk*. Sampai dengan saat ini, GMIM telah berkembang menjadi gereja dengan *resources* paling

menjanjikan. Jumlah anggota GMIM mencapai 789.425 jiwa pada tahun 2014 dan memiliki aset fisik seperti universitas sendiri bernama Universitas Kristen Tomohon (UKIT), mengelola lebih dari 800 sekolah, beberapa rumah sakit, perusahaan-perusahaan, dan perkebunan-perkebunan. Selain itu dari sisi finansial, tergolong fantastis, karena GMIM mampu menggalang dana mencapai hampir 40 milyar rupiah per tahun melalui *voluntary funding* dari jemaat maupun sumber-sumber lokal lainnya.

Mapannya struktur GMIM berimplikasi pada pemberdayaan elit-elit lokal yang bernaung dalam struktur tersebut. Pemberdayaan struktur gereja kian sempurna ketika sistem politik berubah dari rezim sentralistis orde baru ke reformasi pada 1998 yang salah satu agendanya adalah desentralisasi politik di daerah. Saat ini elit-elit politik lokal Minahasa didominasi oleh "orang gereja". Selain sebagai elit-elit politik mereka juga merupakan elit-elit gereja yang disebut "Pelayan Khusus". Menarik, karena dualitas sebenarnya terjadi antara agensi yang merupakan elit-elit lokal tersebut dan struktur yang merupakan gereja. Hubungan timbal balik kekuasaan terjadi antara keduanya, gereja memberdayakan elit, sebaliknya elit merutinisasi struktur gereja demi keuntungan politik elit itu sendiri.

Terbukanya keran demokrasi pasca orde baru ternyata menghasilkan fenomena menarik lainnya. Tren kebangkitan identitas etnis mencuat ke permukaan, demikian juga yang terjadi di Minahasa. Struktur-struktur adat berusaha mencoba mengulang kekuasaan masa lalu. Salah satu penandanya adalah dengan munculnya organisasi-organisasi kemasyarakatan yang berbasis adat antara lain Majelis Adat Minahasa dan Brigade Manguni. Majelis Adat Minahasa tersusun dari perwakilan delapan *tonaas* yang mewakili subetnik terbesar di Minahasa. Sedangkan Brigade manguni

adalah kelompok pemuda adat yang di antaranya ada yang datang dari keluarga *tonaas*. Tokoh-tokoh yang membentuk kelompok-kelompok ini sebenarnya berasal dari latar belakang gereja juga namun dengan kesadaran diskursifnya mencoba keluar dari kebiasaan mapan mereka karena tren dan peluang yang terbuka.

Nyatanya, eksistensi gerakan-gerakan adat ini walaupun tidak dikekang sepenuhnya, tetap dapat dirutinisasi oleh struktur gereja. Politik lembaga adat dan elit-elitnya dibatasi ruang geraknya oleh struktur sehingga tidak cukup kuat mengakarkan pengaruhnya di masyarakat Minahasa secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal itu, Thufail menerangkan bahwa: pertama, berbeda dengan yang terjadi di Sumatera Barat, di Minahasa adat dan agama susah untuk didamaikan. Kepentingan agama dan kepentingan adat sering tidak sejalan bahkan bertabrakan. Elit pemerintahan lokal sejak dulu mendukung GMIM karena para pejabat mengandalkan dukungan kelompok ini untuk memperoleh konstituen dalam proses pemilihan gubernur, bupati, atau walikota, atau pemilihan anggota dewan perwakilan setempat. Kedua, apabila kebangkitan adat seperti di Ambon dan Minangkabau berdampak langsung terhadap kembalinya praktek dan norma tradisional yang pernah dibungkam dalam masa Orde Baru, kebangkitan adat di Minahasa melalui proses yang berbeda dan lebih sulit. Di Minahasa, sedikit sekali "jejak" praktek dan norma adat yang masih tertinggal. Situasi itulah yang menyempitkan ruang gerak dari politik adat di Minahasa.

Fakta diatas menampilkan sebuah contoh langgengnya struktur merutinisasi dalam praktek sosial dalam suatu kehidupan sosial. Struktur "Kristen" yang telah mapan memberi peluang bagi elit-elitnya untuk diberdayakan secara politis. Sementara di satu sisi, memberi pengekanan bagi munculnya usaha-

usaha de-rutinisasi struktur oleh elit-elit lokal lainnya.

Penutup

Dualitas antara agensi yakni elit-elit lokal dan struktur adalah pembentuk kontruksi sosial Minahasa dari masa ke masa. Struktur tradisional yang merupakan lambang kemapanan *tonaas dan walian* di masa lalu mengalami kelayuan disaat elit-elit baru yang bernaung dalam modalitas kolonialnya mende-rutinisasi praktek-praktek sosial lama. Proses de-rutinisasi terjadi dalam dua ranah yaitu dalam ranah politik dan agama. Suatu strategi yang benar-benar tepat sasaran karena dua struktur inilah yang merupakan fondasi kekuasaan elit-elit lama tersebut. Lambat laun, posisi ke-elit-an mereka mulai tergeser oleh elit-elit lokal baru hasil "modernisasi" dan telah dikristenisasi. Dalam konteks kekinian, struktur itu terus dilanggengkan dan dengan demikian semakin memantapkan legitimasi elit-elit lokal Minahasa kristen yang berbasis gereja.

Sejauh ini resistensi agensi berbasis adat yang sempat muncul, mampu di kekang (*constrain*) oleh struktur gereja. Namun pertanyaannya, apakah kekangan struktur gereja ini akan berlangsung selamanya di Minahasa? Tentu saja tidak. Minahasa akan selalu terbaharui dalam perubahan struktur dan agensinya. Tergantung apakah ada elit-elit lokal baru yang mampu mende-rutinisasi kembali kebiasaan lama menjadi praktek sosial baru. Dengan demikian, struktur sosial Minahasa mampu di transformasikan kembali guna memberdayakan kuasa elit-elit lokal baru itu sendiri. Entah oleh agensi adat, atau agensi baru yang lain. *****

Daftar Pustaka

Adam, L. 1975. *Pemerintahan di Minahasa*. Jakarta: Bhratara.

Giddens, Anthony. 2011. *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Yogyakarta: Pedati.

Grafland, N. 1991. *Minahasa: Negeri, Rakyat, dan Budayanya*. Jakarta: Pustaka Utama Mandiri.

Henley, David, Maria J.C. Schouten, dan A.J. Ulaen. 2007. "Memelihara Perdamaian di Minahasa Pasca-Orde Baru", dalam *Politik Lokal di Indonesia*, diedit oleh Henk Schultze Nordholt dan Gerry van Klinken. Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia.

Lundström-Burghoorn, Wil. 1981. *Minahasa Civilization, A tradition of change. [Gothenburg Studies in Social Anthropology 2.]*. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Malensang, Romel Krismanto. 2015. *Penatua dan Kekuasaannya: Studi tentang Strategi Elit Mengkonversi Jabatan Gereja Menjadi Jabatan Politik di Minahasa*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Mawikere, Ferry Raymond. 2002. "Minahasa dan Kolonialisme: Warisan Sejarah, Akselerasi Perubahan, dan Dinamika Hubungan Sampai Akhir Abad ke-19", dalam *Etnik Minahasa dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologi*, diedit oleh Roy E. Mamengko. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nashir, Haedar. 2012. *Memahami Strukturasi dalam Perspektif Sosiologi Giddens*, dalam *Sosiologi Reflektif*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2012, hal. 1-9.

Pantouw, Bertha. 2002. "Minahasa Sebelum Tahun 1829 dan Beberapa Perubahan Dalamnya, Kurun Waktu 1824-1846", dalam *Etnik Minahasa dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologi*, diedit oleh

- Roy E. Mamengko, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saruan, Joseph M. 2002. "Profil Etnik Minahasa", dalam *Etnik Minahasa dalam Akselerasi Perubahan: Telaah Historis, Teologis, Antropologi*, diedit oleh Roy E. Mamengko. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Schouten, M. J. C. 1998. *Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society; Minahasa, 1677-1983*. Netherlands: KITLV Press.
- Thufail, Fadjar I. 2011. "Ketika 'Perdamaian' Terwujud di Bukit Kasih: Pencegahan Konflik, Lembaga Gereja, dan Politik Adat di Minahasa", dalam *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru*, diedit oleh Martin Ramstedt dan Fadjar I. Thufail. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wellem, F.D. 2006. *Kamus Sejarah Gereja*. Jakarta: Gunung Mulia.